

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI**

*(Studi Kasus Pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan
Mentawai)*

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTS OF THE
REGIONAL GOVERNMENTS OF THE MENTAWAI ISLANDS
(Case Study at the Regional Finance Office of Mentawai Islands Regency)

Aspesta Reniar Marsone; Delvianti; Citra Liza

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pengolahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan model regresi berganda. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari responden penelitian melalui kuesioner yang disebar. Sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan *total sampling*. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. nilai signifikan α ($0,024 < 0,05$). Variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dengan sig α ($0,000 < 0,05$). Variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan nilai signifikan α ($0,007 < 0,05$), Pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan menunjukkan hasil yang signifikan yaitu α ($0,000 < 0,05$). Berdasarkan hasil penelitian ini, maka sebaiknya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai mampu meningkatkan kualitas laporannya dengan peningkatan pemahaman pegawai terhadap standar akuntansi pemerintahan yang didukung dengan pemanfaatan sistem akuntansi yang baik yang tentunya harus dengan kompetensi sumber daya manusia yang baik, dimana kompetensi sumber daya manusia mencakup tingkat pendidikan, pemahaman, dan pengalaman

Kata Kunci: Pemahaman Standar Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kualitas Laporan Keuangan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

Abstrack

This study discusses the Analysis of Factors Affecting the Quality of the Financial Reports of the Regional Government of the Mentawai Islands Regency. Data processing in this research is using multiple regression model. The source of data in this study is primary data obtained directly from research respondents through questionnaires distributed. The sample taken in this study used a total sampling technique. The results of the analysis of this study indicate that the variable understanding of government accounting standards has a positive effect on the quality of financial reports. significant value ($0.024 < 0.05$). The variable understanding of government accounting standards has a positive effect on the quality of financial reports with sig ($0.000 < 0.05$). The variable of human resource competence has a positive effect on the quality of financial reports with a significant value of ($0.007 < 0.05$), understanding of government accounting standards, utilization of regional financial accounting information systems and human resource competencies simultaneously shows significant results, namely ($0.000 < 0,05$). Based on the results of this study, it is better if the Regional Finance Agency of the Mentawai Islands Regency is able to improve the quality of its financial reports by increasing employee understanding of government accounting standards supported by the use of a good accounting system which of course must be with good human resource competence, where the competence of human resources covers the level of education, understanding, and experience

Keywords: Understanding of Accounting Standards, Utilization of Financial Accounting Information Systems, Competence of Human Resources, Quality of Financial Reports, Regional Finance Board of Mentawai Islands Regency

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam kinerja pemerintahan, laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting guna memperoleh informasi mengenai posisi keuangan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai oleh pemerintah tersebut selama tahun anggaran yang bersangkutan. Tidak hanya pemerintah pusat yang membuat laporan keuangan, pemerintah wilayah, kota, ataupun provinsi beserta semua dinas serta lembaga juga wajib harus mampu membuat laporan keuangan.

Pemerintah wilayah diberikan wewenang menyelenggarakan pengelolaan keuangannya sendiri. Di buatnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sebagai pedoman dalam proses penataan laporan keuangan daerah, proses penataan laporan keuangan wajib dilakukan secara efisien serta efektif, tepat waktu serta data-data yang dihasilkan dari laporan keuangan tersebut harus akurat.

Laporan keuangan disusun untuk memberikan gambaran informasi tentang posisi harta, utang, dan modal yang terjadi dalam pemerintah daerah tersebut. Pemerintah daerah berkewajiban mempublikasikan informasi berdasarkan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian informasi yang dipublikasikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pemakai (Fuad, 2016:5).

Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan pemerintah ialah Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemahaman akan SAP sangat penting dalam pembuatan laporan keuangan daerah. Nordiawan mengungkapkan (2016:67) bahwasanya terdapat pengaruh antara SAP pada mutu laporan keuangan pemerintah daerah yaitu, SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat maupun di departemen-departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya.

Dalam penataan serta pengelolaan keuangan daerah, dibutuhkan suatu sistem yang mengendalikan proses pengklasifikasian, pengukuran serta pengungkapan transaksi keuangan yang dimaksud dengan sistem akuntansi. Sistem informasi keuangan daerah merupakan suatu sistem pengelompokan, pencatatan serta kegiatan keuangan pemerintah daerah kedalam suatu laporan keuangan sebagai informasi yang bisa digunakan oleh pihak tertentu dalam mengambil keputusan (Yuliani, dkk, 2015:76).

Menurut Isthika, dkk (2014:54), laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah diharuskan mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan berkualitas. SAP disebutkan bahwa laporan keuangan dikatakan berkualitas jika bias memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian yang berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Saat BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan ini, artinya organisasi tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Selain itu penerapan sistem pengendalian internal dapat mengolah adanya suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Isthika, dkk 2014:43).

Menurunkan kualitas laporan diakibatkan belum diterapkannya sistem informasi akuntansi dan minimnya pemahaman akuntansi penyusun laporan keuangan serta masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia dimiliki dan peran internal audit yang masih belum kuat (Isthika, dkk 2014:64).

Selain itu menyusun laporan keuangan diperlukan sistem akuntansi. Dimana dapat menghasilkan laporan keuangan daerah atau sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SIKAD) adalah langkah awal dalam pengumpulan data, pencatatan, meringkas, sampai pelaporan kembali keuangan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan secara manual dan dengan aplikasi komputer (Pemendagri No.59 Tahun 2017).

Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIKAD) meliputi berbagai elemen yang diperlukan dalam proses akuntansi. Perkembangan sistem informasi akuntansi harus berpedoman pada pokok-pokok pengembangan sistem akuntansi yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri. Untuk keperluan dimaksud, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Kepmendagri No.13 tahun 2016.

Menurut Yuliani, dkk (2015:43), fenomena yang terjadi yaitu sejak tahun 2012, pemerintah daerah sudah membuat neraca awal daerah dengan mengacu kepada Pedoman SIKAD hasil Tim Pokja SK Menkeu 355/2001 dan Kepmendagri 29/2002 serta ketentuan yang berlaku serta praktek-praktek internasional. Hingga saat ini, pemerintah daerah yang telah memiliki neraca daerah sebanyak 169 Pemerintah Daerah berdasarkan hasil asistensi yang dilakukan oleh BPKP sebagai anggota Tim Pokja 355/2001. Akan tetapi sampai dengan akhir tahun 2009 seluruh Indonesia hanya 10 LKPD yang memperoleh gelar pendapat WTP dari BPK RI. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terdapat 4 opini yang diberikan pemeriksa yaitu opini wajar tanpa pengecualian (WTP), opini wajar dengan pengecualian (WDP), opini tidak wajar (TW), dan pernyataan menolak memberi opini atau tidak memberi pendapat (TMP).

Berdasarkan hasil audit BPK, banyak pemerintahan daerah yang belum menyajikan laporan keuangan secara wajar. Berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2016, BPK memberikan WTP atas 666 mendapat opini TMP. Berdasarkan fakta tersebut, maka diketahui masih terdapat kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan (BPK, 2017).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dijelaskan tabel berikut ini menunjukkan opini laporan hasil keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai mulai tahun 2013 – 2018

Tabel 1.1 Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2013 – 2018

No	Tahun	Opini
1	2013	WDP
2	2014	WDP
3	2015	WDP
4	2016	WDP
5	2017	WTP
6	2018	WTP

Sumber: <https://padang.bpk.go.id>

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas tentang Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2013 – 2018

memperlihatkan suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Periode tahun 2013-2016 kondisi laporan keuangan mengalami stagnan. Tetapi pada tahun 2017-2018 kondisi laporan keuangan telah mengalami perbaikan dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal inilah yang menjadi menarik bagi penulis dan bertanya bahwa faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hal ini terjadi, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal tersebut.

Jadi, fenomena mengenai kualitas laporan keuangan sangat menarik untuk dikaji lebih jauh. Kenyataan di dalam laporan keuangan pemerintah daerah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai dan tidak mengikuti prinsip akuntansi berlaku umum. Banyak laporan keuangan yang mendapatkan opini tidak wajar dan disclaimer karena dalam penyusunannya belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan belum memenuhi kelengkapan yang telah ditentukan serta kurangnya bukti-bukti transaksi yang dapat ditemukannya.

Selain itu menurut penelitian Sari, dkk (2014) juga mengatakan hal yang sama. Fakta yang terjadi menurut Sari, dkk berdasarkan hasil BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2012, Kabupaten Jembrana mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (Metrobali, 2013). Rendahnya kualitas laporan dapat disebabkan oleh pemahaman akuntansi dari penyusun laporan itu sendiri atau belum diterapkannya secara optimal sistem informasi akuntansi keuangan dan atau peran internal audit masih lemah (Sari, dkk, 2014).

Fenomena diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wati, dkk (2014) yang mengatakan bahwa pemerintah telah berupaya untuk menyusun laporan berdasarkan sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga kualitas yang dihasilkan dari laporan keuangan daerah tersebut dapat meningkat. Namun kenyataannya tidak semua pegawai di pemerintahan memahami sistem akuntansi keuangan daerah tersebut.

Sumber daya manusia adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu instansi bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2017: 146).

Penelitian Yuliani, dkk (2015:47) tentang “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Diani (2013:54) tentang” Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Parlaman)”. Hasil dalam penelitian

ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman akuntansi dan peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian Sari, dkk (2014) tentang pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menyimpulkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Yuliani, dkk (2010), Diani (2013) dan Sari, dkk (2014) adapun perbedaannya pada objek penelitian dan pengembangan variabel yang berbeda yaitu dengan objek di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati dan menambah variabel kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang timbul dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain yaitu, karena Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIKAD) belum sepenuhnya dapat meningkatkan efektifitas, menjawab kebutuhan informasi, meningkatkan kinerja, dan meningkatkan efisiensi aparatur pemerintah dalam mengerjakan pekerjaannya.

Namun secara persepsi, badan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melaksanakannya dengan sebaik mungkin, namun dalam kenyataannya yang ada belum bisa membuktikan bahwa mereka mampu untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

Jadi hal ini menunjukkan bahwa badan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai belum sepenuhnya memanfaatkan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terbukti dari hasil laporan keuangan yang telah dijelaskan di atas. Padahal sistem informasi akuntansi keuangan daerah (SIKAD) adalah suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan sebagai bagian dari sistem informasi manajemen pemerintah daerah.

Dengan berbagai informasi pengguna laporan keuangan, bahwa badan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai wajib menyajikan informasi keuangan daerah secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seluruh informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat perencanaan, melakukan pengendalian dan pengambilan keputusan. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian ini lebih focus kepada faktor kualitas laporan keuangan yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah serta sumber daya manusia.

Berdasarkan uraian di atas mengingat pentingnya kompetensi sumber daya manusia yang memadai dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas bagi Satuan Perangkat Kerja Daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini mengambil judul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.**”

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
4. Apakah pemahaman standar akuntansi pemerintah (SAP), pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
3. Mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
4. Mengetahui pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah (SAP), pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

TINJAUAN PUSTAKA

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Bastian (2016: 96), laporan keuangan merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) PP Tahun 2016 menyatakan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran- ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan. Keempat karakteristik tersebut merupakan persyaratan normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Keempat karakteristik tersebut antara lain :

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi

masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud pengguna.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajian tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal yang dilakukan apabila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Pemahaman Standar Akuntansi (SAP)

Standar Akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Standar Akuntansi pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang disusun dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (Fakhrurazy, 2016:78).

Indikator Pemahaman Standar Akuntansi (SAP)

Adapun delapan prinsip indikator yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah menurut Afiah (2017) yaitu:

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

b. Nilai Histori (*Historical cost*)

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal yang tidak terdapat nilai historis dapat menggunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Realisasi (*Realization*)

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat laporan realisasi anggaran masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

d. Periodisitas (*periodity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan dan semesteran juga dianjurkan.

Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan sistem informasi yang mampu menangani proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penyusunan anggaran, sampai dengan pelaporan keuangan daerah. Menurut Oktaviani (2016:67).

Indikator Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Arfida (2015: 157-159) Berikut ini adalah indikator sistem akuntansi keuangan daerah menurut Yuliani (2017) adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat kecepatan
- b. Tingkat keamanan
- c. Tingkat efisiensi biaya
- d. Tingkat kualitas hasil

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut dapat melaksanakannya tugasnya secara profesional, efektif dan efisien (Keputusan Kepala BKN Nomor 46A 2007) dalam Devi Roviyantie (2016:67).

Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Hutapea dan Thoha (2018: 8) mengungkapkan bahwa terdapat tiga komponen utama dalam pembentukan kompetensi, Komponen ini selanjutnya akan digunakan sebagai indikator penelitian untuk mengukur kompetensi sumber daya manusia, berikut merupakan komponen pembentukan Kompetensi Sumber Daya Manusia:

a. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai bidang yang digelutinya (tertentu). Ilmu atau informasi yang dimiliki seorang pegawai dapat digunakan dalam kondisi nyata dalam suatu pekerjaan.

b. Keterampilan (*skill*)

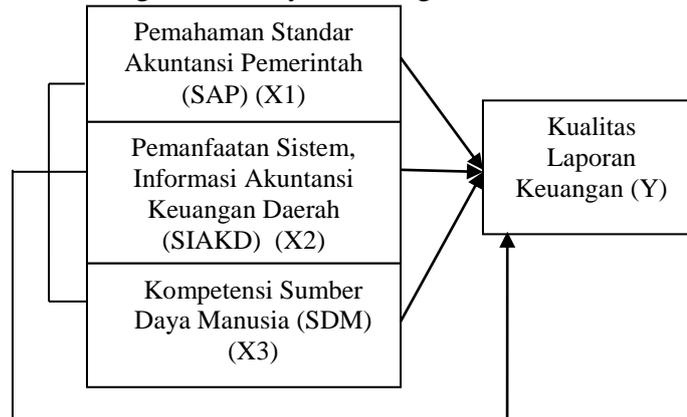
Keterampilan merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan instansi kepada seorang pegawai dengan baik dan maksimal.

c. Sikap (*attitude*)

Sikap merupakan pola tingkah seorang pegawai di dalam peran melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan instansi.

Kerangka Konseptual

Sesuai dengan telaah literatur yang telah dikemukakan di atas, dapat dikembangkan suatu kerangka teoritis yaitu sebagai berikut:



Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis di bawah ini pada dasarnya merupakan dugaan sementara terhadap suatu masalah yang harus dibuktikan kebenarannya, adapun hipotesis yang dirumuskan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Standar akuntansi pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Pemakaian standar akuntansi ini cenderung dilakukan karena dapat memperbaiki sistem yang sudah dipergunakan sebelumnya, sehingga informasi keuangan sebagai bahan pengguna laporan keuangan menjadi lebih akurat dan kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat dihindarkan.

Pemahaman standar akuntansi pemerintah yang baik akan menghasilkan kualitas yang handal dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan kata lain laporan keuangan yang relevan disebabkan karena pemahaman yang baik akan berbasis akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan penyajian yang lengkap atas seluruh informasi.

Sari, dkk (2014), menyatakan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian tersebut pemahaman standar akuntansi pemerintah akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Megawati, dkk (2015), Udiyanti, dkk (2014), Sari, dkk (2014), Wati, dkk (2014), Diani (2013), Yuliani, dkk (2010) dan Nugraheni, dkk (2008), menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah yang berpengaruh positif terhadap kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H1: Diduga Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

2. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan sistem informasi yang digunakan dalam mencatat transaksi-transaksi keuangan pemerintah daerah dan membantu dalam menyusun laporan keuangan. Menurut Silviana (2013), pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dapat dievaluasi sebagai nilai tambah dalam kinerja pemerintah daerah.

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang benar akan memudahkan dalam menyediakan informasi yang handal, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal itu dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang dapat disajikan kepada masyarakat, serta meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan.

Sari, dkk (2014), menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian itu menyatakan bahwa semakin baik pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan meningkat. Penelitian lain yang menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah Megawati, dkk (2015), Sari, dkk (2014). Maka dapat disusun hipotesis dalam konteks pemerintahan ini sebagai berikut:

H2: Diduga Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Widodo (2017) mengemukakan bahwa determinan yang harus tersedia dan melekat dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah selain faktor pembiayaan dan prasarana. Sementara itu kondisi dilapangan banyak terdapat hambatan mengenai kapasitas sumber daya manusia itu sendiri dan implementasinya. Kurangnya moralitas dan disiplin aparatur,rendahnya motivasi,inovasi dan kreativitas kerja, penempatan aparatur yang tidak sesuai kondisi yang hampir terjadi pada sebagian besar SKPD meskipun tidak dipungkiri terdapat SKPD yang berjalan dengan baik.

Megawati, dkk (2015), menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian itu menyatakan bahwa semakin baik kompetensi sumber daya manusia (SDM) maka kualitas laporan keuangan yang akan dihasilkan. Maka dapat disusun hipotesis dalam konteks pemerintahan ini sebagai berikut:

H3: Diduga Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

4. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan laporan keuangan yang memiliki manfaat dan digunakan untuk tujuan umum, laporan keuangan harus memuat informasi yang memenuhi syarat dan sesuai dengan standar sehingga laporan keuangan menjadi berkualitas. Laporan Keuangan pemerintah Daerah dapat dikatakan berkualitas apabila informasi yang ada didalamnya dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh pengguna. Laporan Keuangan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya yang mungkin mempengaruhi adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah.

Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan penggerak roda organisasi dalam sebuah instansi. Kompetensi Sumber Daya Manusia dibutuhkan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan dari suatu instansi. Sumber daya manusia yang kompeten cenderung dapat menerapkan logika akuntansi dan meminimalisir kekeliruan.

Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah, penyusun laporan keuangan dapat meminimalisir kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Selain itu, dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

Faktor pendukung kualitas laporan keuangan adalah sistem informasi akuntansi, dimana laporan keuangan dihasilkan dari unsur-unsur sistem informasi akuntansi yang didasarkan pada input yang baik dan output yang baik. Aspek tersebut haruslah terpadu dan berkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik.

Jika sumber daya berkompeten dan memahami standar akuntansi pemerintah serta didukung dengan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang memadai maka dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas

H4: Diduga Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Secara Bersama-sama Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada suatu lembaga Badan Keuangan Daerah berlokasi di Jl. Raya Tuapejat KM 4 Sipora Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat.

Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi yang sebaik-baiknya dengan asumsi agar sasaran dalam penulisan dapat tercapai, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu peninjauan langsung pada perusahaan yang diteliti untuk memperoleh data primer. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah wawancara, yaitu melakukan penelitian langsung untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terlibat langsung.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu teknik pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, serta literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti yang berguna sebagai pedoman teoritis pada waktu melakukan penelitian lapangan dan untuk mendukung serta menganalisa data.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti mengumpulkan data dalam empat cara yaitu:

a. Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung di lokasi untuk memperoleh data yang akurat.

1) Tahap persiapan atau perencanaan

- a) Menetapkan tujuan pembelajaran khusus
- b) Menetapkan objek yang akan diobservasi
- c) Menentukan alat/instrument peroleh data dalam mengadakan observasi.

2) Tahap pelaksanaan

- a) Melakukan pengamatan, dimana siswa secara langsung menuju obyek yang diobservasi
- b) Siswa mengumpulkan data (inventarisasi data) dari pengamatan terhadap obyek yang diobservasi.
- c) Menganalisis dan mengevaluasi data, yaitu dengan siswa mengadakan pencatatan terhadap peristiwa, kejadian-kejadian atau gejala-gejala yang terjadi
- d) Mendiskusikan hasil pengamatan dengan tim lalu menarik kesimpulan

b. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan serta arsip-arsip perusahaan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.

c. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner yang digunakan oleh peneliti sebagai instrumen penelitian, metode yang digunakan adalah dengan kuesioner tertutup (Sugiono, 2015: 199)

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian metode yang menggunakan populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah disampaikan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Data primer ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden penelitian melalui kuesioner yang disebar. Kuisisioner ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada responden. Kuesioner disebar dan sekaligus dikumpulkan langsung oleh peneliti.

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan kelompok, peristiwa atau suatu ketertarikan yang ingin diselidiki oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Keuangan Daerah Mentawai yang berjumlah 46 orang

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi atau sebagian populasi yang menjadi subyek penelitian yang dapat mewakili populasi penelitian (Arikunto, 2013). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2015:84) pengertian *Purposive Sampling* adalah sebagai berikut: "Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu." Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan *Teknik Purposive Sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis tentukan, oleh karena itu penulis memilih Teknik *Purposive Sampling* dengan menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, terdapat kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah pegawai yang terlibat langsung dalam pencatatan laporan keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu Pegawai biro keuangan yang berjumlah 34 orang. Berikut ini adalah table sampel penelitian.:

Tabel 3.2 Sampel Penelitian

	Jabatan	Jumlah
1.	Kasubag keuangan	1
2.	Kabid Anggaran	1
3.	Kabid Pembinaan dan Keuangan	1
4.	Kasubid akuntansi	1
5.	Kasubid Kasubid Pembinaan Penatausahaan Keuangan&Aset Desa	1
6.	Kasubid Perencanaan Keuangan&Aset	1
7.	Pegawai keuangan	28
	Total Sampel	34

Metode Analisis Data

Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan berbagai pengujian statistik. Analisis data tidak hanya digunakan untuk menguji hipotesis tetapi juga untuk pengujian statistik lainnya.

Metode Penelitian yang menggambarkan suatu fenomena sosial atau pemahaman dari suatu realita dan merincikan menjadi variabel yang saling berkaitan dengan tujuan memperoleh pemahaman dan makna dari masalah yang akan diteliti. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya persentase jawaban responden terhadap kedua variabel yang dianalisa.

Menurut Sugiyono (2015:93) bahwa untuk mengukur pendapat atau persepsi seseorang atau kelompok sosial dalam suatu penelitian menggunakan skala pengukuran Liker. Skala Liker akan merubah variabel-variabel menjadi indikator variabel yang pada akhirnya dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen berupa pernyataan atau pertanyaan. Instrumen penelitian ini dibuat dalam bentuk ceklis dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila jawaban responden Sangat Setuju (SS) diberi nilai = 5
2. Apabila jawaban responden Setuju (S) diberi nilai = 4
3. Apabila jawaban responden Kurang Setuju (KS) diberi nilai = 3
4. Apabila jawaban responden Tidak Setuju (TS) diberi nilai = 2
5. Apabila jawaban responden Sangat Tidak Setuju (STS) diberi nilai = 1

Menurut Arikunto (2016:65) Analisis ini bermaksud untuk menggambarkan karakteristik masing-masing variabel penelitian. Dengan cara menyajikan data ke dalam tabel distribusi frekuensi, menghitung nilai rata-rata, skor total, dan tingkat pencapaian responden (TCR) serta menginterpretasikannya. Analisis ini tidak menghubungkan-hubungkan satu variabel dengan variabel lainnya dan tidak membandingkan satu variabel dengan variabel lainnya. Untuk mencari tingkat pencapaian jawaban responden digunakan rumus berikut:

$$TCR = \frac{\text{rata-rata skor}}{5} \times 100$$

Dimana: TCR = tingkat pcpaian jawaban responden menyatakan bahwa kriteria nilai tingkat capaian responden (TCR) dapat diklasifikasikan sebagai berikut

Tabel 3.3 : Tingkat Capaian Responden

No	Tingkat Capaian Responden (TCR)	Kriteria
1	90 % - < 100 %	Sangat Baik
2	80 % - < 90 %	Baik
3	65 % - < 80 %	Cukup Baik
4	55% - < 65 %	Kurang Baik
5	0% - < 55 %	Tidak Baik

Uji Intrumen

Instrumen penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuisiner yang dibuat sendiri oleh peneliti. Sugiyono (2014: 92) menyatakan bahwa "Instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati". Dengan demikian, penggunaan instrumen penelitian yaitu untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah, fenomena alam maupun sosial.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data yang akurat yaitu dengan menggunakan skala Likert. Sugiyono

(2014:134) menyatakan bahwa “Skala Likert digunakan untuk mengukur suatu sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial.

1. Uji Validitas

Pengujian terhadap validitas dilakukan untuk meyakinkan bahwa pengukuran yang digunakan benar-benar mengukur konsep yang akan diukur (Sekaran, 2016:41). Validitas yang akan diuji dalam penelitian ini adalah *construct validity*. *Construct validity* ditunjukkan oleh koefisien korelasi yang diperoleh pada masing-masing item pertanyaan (skor butir) dengan skor totalnya. Koefisien korelasi antar item (skor butir) dan skor totalnya merupakan indeks validitas item (skor butir), dengan koefisien yang relatif tinggi menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan dapat dikatakan valid. Uji validitas dilakukan dengan metode *Pearson's Product Moment*.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas pengukuran menunjukkan tingkat kebebasan pengukuran dari bias atau kesalahan (Sekaran, 2014:41). Reliabilitas pengukuran menunjukkan stabilitas dan konsistensi instrumen pengukuran dalam mengukur konsep. Pengujian reliabilitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *interitem consistency reliability* (reliabilitas konsistensi antar item). Tes ini dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban responden terhadap semua item pertanyaan dalam suatu pengukuran (Sekaran, 2014). Cara yang digunakan untuk uji reliabilitas adalah dengan menghitung *Cronbach's coefficient alpha*.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi tersebut benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif maka model dari uji asumsi klasik tersebut harus memenuhi asumsi klasik regresi (Ghozali, 2011:161).

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013: 160). Seperti diketahui bahwa Uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik atau uji statistik (Ghozali, 2013: 160).

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Jika data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka menunjukkan pola distribusi normal yang mengindikasikan bahwa regresi memenuhi asumsi normal. Uji Statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji *statistic non-parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S)* Artinya jika nilai *Kolmogrov-Smirnov* > 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal.

2. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2013: 105). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi adalah sebagai berikut:

- a. Nilai R square (R²) yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang sangat tinggi, tetapi secara individual tidak terikat
- b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (lebih dari 0,09), maka merupakan indikasi adanya multikolonieritas
- c. Melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF), suatu model regresi yang bebas dari masalah multikolonieritas apabila mempunyai nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2013:44). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data *crosssection* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar).

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah regresi linier untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari dua (Sugiono, 2014: 210). Adapun persamaan model regresi berganda tersebut adalah (Sugiono, 2014: 210):

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + e$$

Keterangan:

Y : nilai prediksi dari Y

a : bilangan konstan

b₁, b₂, ..., b_k : koefisien variabel bebas

SAP : Pemahaman standar akuntansi pemerintah

SIAKD : Pemanfaatan sistem akuntansi Pemerintah

SDM : Kompetensi sumber daya manusia

Mendeteksi variabel X dan Y yang akan dimasukkan (entry) pada analisis regresi di atas dengan bantuan software sesuai dengan perkembangan yang ada, misalkan sekarang yang lebih dikenal oleh peneliti SPSS. Hasil analisis yang diperoleh harus dilakukan interpretasi (mengartikan), dalam interpretasinya pertama kali yang harus dilihat adalah nilai F-hitung karena F-hitung menunjukkan uji secara simultan (bersama –sama), dalam arti variabel X₁, X₂, ...X_n secara bersama –sama mempengaruhi terhadap Y.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen (Ghozali, 2016:58).

Uji Hipotesis

1. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial (Ghozali, 2016).

Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian ini menurut Ghozali (2016) adalah jika $p\text{ value} < 0,05$ maka Hipotesis diterima. Sebaliknya, jika $p\text{ value} \geq 0,05$ maka Hipotesis ditolak (Ghozali, 2016:44).

1. Menentukan Tingkat Signifikan

Tingkat signifikan pada penelitian ini adalah 5% dimana dapat di ketahui dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

- a. Jika angka signifikan (sig) $< 0,05$ maka kedua variabel mempunyai hubungan yang signifikan.
- b. Jika angka signifikan (sig) $> 0,05$ maka kedua variabel tidak mempunyai hubungan yang signifikan.

2. Pengambilan Keputusan

- a. Jika $T\text{ hitung} < T\text{ tabel}$, maka H_0 diterima H_1 ditolak
- b. Jika $T\text{ hitung} > T\text{ tabel}$ maka H_0 ditolak H_1 diterima

2. Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat (Ghozali, 2016).

Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian yang menggunakan $p\text{ value}$ atau $F\text{ hitung}$ adalah jika $p\text{ value} < 0,05$ atau $F\text{ hitung} \geq F\text{ tabel}$ maka Hipotesis diterima. Sebaliknya, jika $p\text{ value} \geq 0,05$ atau $F\text{ hitung} < F\text{ tabel}$ maka Hipotesis ditolak (Ghozali, 2016:43).

1. Menentukan Tingkat Signifikan

Tingkat signifikan pada penelitian ini adalah 5% ($\alpha=0,05$), dimana nilai df_1 diperoleh dari jumlah variabel 1 dan df_2 dari $n-k-1$ dimana n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel dependen.

2. Pengambilan Keputusan

- a. Jika $F\text{ hitung} < F\text{-tabel}$, maka H_0 diterima H_1 ditolak
- b. Jika $F\text{ hitung} \geq F\text{ tabel}$ maka H_0 ditolak H_1 diterima

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

a. Variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1)

Berikut ini ringkasan hasil pengujian validitas untuk item atau butir pertanyaan variabel dengan pendekatan koefisien korelasi untuk nilai $n=34$ $r_{table}=0.339$ melalui *korelasi pearson* yang disajikan pada tabel 4.1 :

Tabel 4.1
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1)

No Item	Batas Valid	Koefisiensi Korelasi	Keterangan
1	0.339	0.570	Valid
2	0.339	0.903	Valid
3	0.339	0.762	Valid
4	0.339	0.546	Valid
5	0.339	0.905	Valid
6	0.339	0.762	Valid
7	0.339	0.576	Valid
8	0.339	0.900	Valid
9	0.339	0.875	Valid
10	0.339	0.478	Valid
11	0.339	0.513	Valid
12	0.339	0.766	Valid

Sumber : Hasil pengolahan data, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan semua item pemahaman standar akuntansi pemerintah 1 sampai item 12 adalah valid dimana nilai *correlated item total correlation* > 0.339 .

b. Variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (X2)

Berikut ini ringkasan hasil pengujian validitas untuk item atau butir pertanyaan variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah 1 sampai 12 dengan pendekatan koefisien korelasi untuk nilai $n= 34$ $r_{tabel} = 0.339$ melalui korelasi pearson yang disajikan pada tabel 4.2:

Tabel 4.2
Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (X2)

No Item	Batas Valid	Koefisiensi Korelasi	Keterangan
1	0.339	0.564	Valid
2	0.339	0.774	Valid
3	0.339	0.808	Valid
4	0.339	0.777	Valid
5	0.339	0.736	Valid
6	0.339	0.840	Valid
7	0.339	0.556	Valid
8	0.339	0.551	Valid
9	0.339	0.764	Valid
10	0.339	0.487	Valid
11	0.339	0.564	Valid
12	0.339	0.774	

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan semua item 1 sampai item pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah 12 adalah valid dimana nilai *correlated item total correlation* > 0.339 .

c. **Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)**

Berikut ini ringkasan hasil pengujian validitas untuk item atau butir pertanyaan variabel kompetensi sumber daya manusia dengan pendekatan koefisien korelasi untuk nilai $n = 34$ r tabel = 0.339 melalui *korelasi pearson* yang disajikan pada tabel 4.3

Tabel 4.3 Income (X3)

No Item	Batas Valid	Koefisiensi Korelasi	Keterangan
1	0.339	0.490	Valid
2	0.339	0.749	Valid
3	0.339	0.611	Valid
4	0.339	0.557	Valid
5	0.339	0.810	Valid
6	0.339	0.829	Valid
7	0.339	0.684	Valid
8	0.339	0.658	Valid
9	0.339	0.672	Valid

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan semua item kompetensi sumber daya manusia 1 sampai item 9 adalah valid dimana nilai *correlated item total correlation* > 0.339

d. **Pengujian Validitas Kualitas Laporan Keuangan (Y)**

Berikut ini ringkasan hasil pengujian validitas untuk item atau butir pertanyaan variabel kualitas laporan keuangan dengan pendekatan koefisien korelasi untuk nilai $n = 34$ r tabel = 0.339 melalui *korelasi pearson* yang disajikan pada tabel 4.7

Tabel 4.4 Kualitas Laporan Keuangan (Y)

No Item	Batas Valid	Koefisiensi Korelasi	Keterangan
1	0.339	0.609	Valid
2	0.339	0.824	Valid
3	0.339	0.733	Valid
4	0.339	0.570	Valid
5	0.339	0.680	Valid
6	0.339	0.684	Valid
7	0.339	0.552	Valid
8	0.339	0.653	Valid
9	0.339	0.489	Valid
10	0.339	0.690	Valid
11	0.339	0.572	Valid
12	0.339	0.588	Valid

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan semua item kualitas laporan keuangan 1 sampai item 12 adalah valid dimana nilai *correlated item total correlation* > 0.339

Reabilitas

Tabel 4.5 Hasil Uji Reabilitas

No	Variabel	Cronbachs Apha	Keterangan
1	Pemahaman Standar akuntansi Pemerintah	0,936	Reliabilitas
2	Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah	0,923	Reliabilitas
3	Kompetensi sumber daya manusia	0,899	Reliabilitas
4	Kualitas laporan keuangan	0,932	Reliabilitas

Berdasarkan tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan realibel. Semua variabel realibel disebabkan karena hasil *correlated total item correlation* besar dari 0.339 (untuk $n=34$ r table = 0.339)..

Uji Normalitas

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		34
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	3.10932290
Most Extreme Differences	Absolute	0,144
	Positive	0,73
	Negative	-0,144
Test Statistic		0.144
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.071 ^{c,d}

Dari Tabel 4.6 diketahui bahwa nilai Asym.Sig (2-tailed) untuk unstandardized residual sebesar 0.071, dapat disimpulkan bahwa nilai Asym.Sig (2-tailed) dalam penelitian ini nilainya lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan pada penelitian yaitu ($\alpha = 0,05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian berdistribusi normal, dengan demikian analisis regresi linear berganda dapat dilaksanakan karena data telah berdistribusi normal

Uji Multikolinieritas

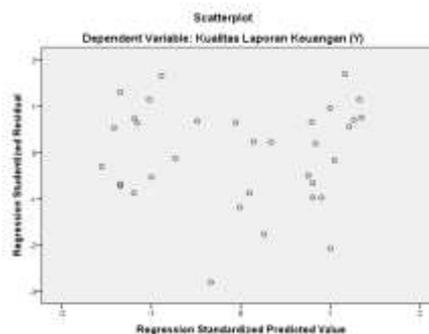
Tabel 4.6

No	Variabel	Cronbachs Apha		Keterangan
		Tolerance	VIF	
				Tidak Multikolinieritas
1	Pemahaman Standar akuntansi Pemerintah	0.202	4,948	Tidak Multikolinieritas
2	Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah	0.128	7,822	Tidak Multikolinieritas
3	Kompetensi sumber daya manusia	0.171	4,013	Tidak Multikolinieritas

Berdasarkan hasil olahan data untuk uji multikolinieritas sebagaimana terlihat pada tabel 4.14 di atas diketahui bahwa nilai *tolerance* dari *Collinearity Statistics* mendekati 1 (satu) dan nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*) untuk semua variabel bebas di bawah 10 (sepuluh). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang berarti antara sesama variabel bebas. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data hasil penelitian ini tidak mengalami kasus multikolinieritas sehingga pengolahan data dengan regresi linear berganda dapat dilanjutkan, karena tidak terdapat kasus multikolinieritas antara sesama variabel bebas.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.1



Berdasarkan gambar 4.1 ditemukan penyebaran data tidak teratur, hal tersebut terlihat pada plot yang menyebar atau terpecah dan tidak membentuk pola tertentu, hal ini dapat disimpulkan tidak ada terjadi kasus heterokedastisitas, maka dapat disimpulkan tidak ada terjadi heterokedastisitas maka penelitian dapat dilanjutkan.

Regresi Linear Berganda dan Uji T

Tabel 4.7

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.008	3.301		.305	.762
Standar Akuntansi Pemerintah	.323	.136	.280	2.372	.024
Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	.743	.187	.590	3.974	.000
Kompetensi Sumber Daya Manusia	.717	.122	.233	3.672	.007

1. Nilai konstanta sebesar 1,008 yang berarti bahwa jika tidak ada variabel bebas yang terdiri pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, maka besarnya kualitas laporan keuangan adalah 1,008.
2. Variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah (X1) mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, dengan koefisien regresi pemahaman standar akuntansi pemerintah dari perhitungan linier berganda dapat dilihat sebesar 0,323 maksudnya adalah jika setiap kenaikan 1 satuan pemahaman standar akuntansi pemerintah (X1) akan menyebabkan meningkatnya kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 0,323, asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan.
3. Variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X2) mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, dengan koefisien regresi sebesar 0,743, yang artinya apabila pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X2) meningkat sebesar 1 satuan, maka kualitas laporan keuangan (Y) akan meningkat sebesar 0,743 dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan.
4. Variabel kompetensi sumber daya manusia (X3) mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, dengan koefisien regresi sebesar 0,717, yang artinya apabila kompetensi sumber daya manusia (X3) meningkat sebesar 1 satuan, maka kualitas laporan keuangan (Y) akan meningkat sebesar 0,717 dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan

Uji Koefisiensi Determinasi

Tabel 4.8

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.0957 ^a	0.916	0.907	3,261

Menurut (Ghozali, 2013), Nilai R^2 memiliki nilai interval antar 0 sampai 1 semakin besar R^2 (mendekati 1), maka semakin baik pula hasil untuk model tersebut dan semakin mendekati 0, maka independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen ($0 \leq R^2 \leq 1$). Besar nya nilai adjusted R^2 sebesar 0,907 yang berarti variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 90,7 % sedangkan sisanya 9,3 % dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Uji t

Hasil perhitungan yang didapat pada tabel 4.7 variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah secara statistik menunjukkan hasil yang signifikan pada nilai lebih kecil dari α ($0,024 < 0,05$). Sedangkan nilai t hitung $X_1 = 2,372$ dan t tabel sebesar 2.042 sehingga t hitung $>$ t tabel ($2,372 > 2.042$). Maka H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variable Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada pegawai biro keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Hasil perhitungan yang didapat pada tabel 4.7 variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah secara statistik menunjukkan hasil yang signifikan pada nilai lebih kecil dari α ($0,000 < 0,05$). Sedangkan nilai t hitung $X_2 = 3,974$ dan t tabel sebesar 2,019 sehingga t hitung $>$ t tabel ($3,974 > 2.042$). Maka H_2 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variable pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Hasil perhitungan yang didapat pada tabel 4.7 variabel kompetensi sumber daya manusia secara statistik menunjukkan hasil yang signifikan pada nilai lebih kecil dari α ($0,007 < 0,05$). Sedangkan nilai t hitung $X_3 = 3,672$ dan t tabel sebesar 2.042 sehingga t hitung $>$ t tabel ($3,672 > 2.042$). Maka H_3 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variable kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Uji F

Tabel 4.10 Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	3461.224	3	1153.741	108.489	0,000
Residual	319.040	30	10.635		
Total	3780.265	33			

Berdasarkan tabel 4.18 di atas nilai F hitung diperoleh 108.489 dengan tingkat signifikansi 0,000, karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_4 diterima dan nilai F hitung $>$ F tabel ($108.489 > 2.91$) dengan nilai F tabel df: F (k ; n-k) atau F (3; 34-3) = 2.91. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai..

Hasil dan Pembahasan

Bedasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, maka data hasil penelitian disajikan dan dianalisa sesuai dengan tujuan penelitian yang diajukan sebagai berikut:

1) Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (SAP)

Bedasarkan persamaan regresi di atas, pemahaman standar akuntansi pemerintah (X1) koefisien regresi sebesar 0,323 maksudnya adalah jika setiap kenaikan 1 satuan pemahaman standar akuntansi pemerintah akan menyebabkan meningkatnya kualitas laporan keuangan sebesar 0,323 dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan. Berdasarkan pada tabel 4.17 di atas variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah mempunyai nilai signifikansi 0,024 kurang dari 0,05. Sedangkan nilai t hitung $X1 = 2,372$ dan t tabel sebesar 2,042 sehingga t hitung $>$ t tabel ($2,372 > 2,042$). Maka H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yogi dkk (2014), yang mengemukakan bahwa berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan jika pemahaman SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Embrana. Jadi dapat dikatakan bahwa, jika pegawai pengelola keuangan semakin paham terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga semakin meningkat. Hal yang sama dijelaskan dalam penelitian Diah dkk (2014), mengatakan bahwa pemahaman pegawai mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Bandung.

Variable Pemahaman SAP berpengaruh positif dan signifikan karena didukung dengan *agency theory* (Arief 2015:97) dimana untuk pemerintah daerah sebagai agen yang bertanggung jawab kepada principal dalam hal ini bentuk pertanggung jawaban yaitu dalam bentuk laporan keuangan daerah, untuk memenuhi kewajiban tersebut pemerintah daerah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, salah satu yang paling utama dalam pembuatan laporan tersebut ialah setiap pegawai pembuat laporan keuangan harus memahamai standar akuntansi pemerintahan dengan baik sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang akurat, andal, dapat dipertanggungjawabkan serta bisa menjadi informasi yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan tersebut. Karena hasil pengujian menunjukkan hasil yang positif dan signifikan jadi dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima.

2) Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Bedasarkan persamaan regresi di atas, pemahaman standar akuntansi pemerintah dengan koefisien regresi sebesar 0,743 maksudnya adalah jika setiap kenaikan 1 satuan pemahaman standar akuntansi pemerintah akan menyebabkan peningkatan Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar 0,743

dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan. Berdasarkan pada tabel 4.17 diatas nilai t hitung sebesar 3,974 dan sig t sebesar 0,000. Dengan demikian sig t pada nilai lebih kecil dari α ($0,000 < 0,05$). Sedangkan nilai t hitung X^2 3,974 dan t tabel sebesar 2,042 sehingga t hitung $>$ t table ($3,974 > 2,042$). Maka H2 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima dan disimpulkan bahwa variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini didukung oleh teori *agency theory* (Arief 2016) dimana peran agen sebagai pihak yang bertanggungjawab kepada *stakeholder* harus menyajikan sebuah informasi yang akurat dan tepat waktu. Salah satu upaya yang dilakukan pihak agen ialah dengan pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dengan sistem informasi yang terkomputerisasi dengan baik dan terintegrasi dengan jaringan internet yang baik akan mampu menghasilkan informasi keuangan yang baik dan memenuhi karakteristik kualitatif sehingga informasi yang disajikan oleh agen dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak pengguna laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yogi dkk (2015) yang menyatakan bahwa pemanfaatan pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jembrana, hal ini sesuai dengan teori yang dinyatakan Ahmad (2018) bahwa untuk terselenggaranya proses penyampaian informasi yang cepat dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Dalam kerangka ini, undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah mengamanatkan adanya dukungan sistem informasi keuangan daerah yang diselenggarakan secara nasional. Hasil penelitian Juwita (2015) juga menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasar hasil penelitian diatas yang menunjukkan bahwa pemanfaatan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan dalam peningkatan kualitas laporan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berarti bahwa hipotesis kedua (H2) diterima.

3) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan persamaan regresi di atas, kompetensi sumber daya manusia dengan koefisien regresi sebesar 0,717 maksudnya adalah jika setiap kenaikan 1 satuan kompetensi sumber daya manusia akan menyebabkan peningkatan kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 0,717 dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan. Berdasarkan pada tabel 4.17 diatas nilai t hitung sebesar 3,672 dan sig t sebesar 0,007. Dengan demikian sig t pada nilai lebih kecil dari α ($0,007 < 0,05$). Sedangkan nilai t hitung X^3 3,672 dan t tabel sebesar 2,042 sehingga t hitung $>$ t table ($3,672 > 2,042$).

Maka H3 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ihsanti (2015) bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini berarti jika SDM keuangan atau akuntansi berkompeten maka laporan keuangan daerah yang dihasilkan akan lebih berkualitas, hasil ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Desiana dkk (2015) yang mengemukakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Kompetensi Sumber Daya Manusia maka semakin baik Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seorang pegawai yang berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dalam menyelesaikan kinerjanya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien dan efektif. Adanya kompetensi sumber daya manusia maka akan mendukung ketepatan waktu pembuatan laporan keuangan.

Jika kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat, sehingga laporan keuangan yang baik dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Dengan demikian kompetensi sumber daya manusia ditunjukkan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dapat diterapkan.

Jadi dengan adanya kompetensi sumber daya manusia dapat diketahui apakah suatu pemerintahan telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, efektif, dan efisien. Sehingga dengan adanya kompetensi sumber daya manusia mendorong terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas yang bebas dari salah saji material dan pengertian yang menyesatkan.

4) Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil statistik secara simultan didapat hasil bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan hal ini dapat dilihat pada tabel 4.18 bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti $0,000 < 0,05$. Sedangkan nilai f hitung lebih besar dari f tabel ($108,489 > 2,91$). Dapat disimpulkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Jadi hipotesis keempat (H4) dapat diterima yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ropiyantie (2017) yaitu kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan (PP No. 71 Tahun 2015).

Standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan. Sehingga standar akuntansi keuangan merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Standar akuntansi pemerintahan yang telah diterapkan dengan baik dalam suatu entitas maka akan menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipercayai serta dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2015:89).

Jadi penerapan standar akuntansi pemerintahan adalah salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Oleh karena itu, dalam penyusunan laporan keuangan harus diterapkan standar akuntansi pemerintahan agar kualitas laporan yang dihasilkan semakin baik. Selain itu juga harus memahami sistem akuntansi keuangan daerah dalam penyusunan laporan keuangan dan didukung oleh kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki. Dengan adanya penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik, dan didukung oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah serta kompetensi sumber daya manusia, maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, dalam hal ini laporan keuangan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan para pengambil keputusan. Laporan keuangan dikatakan andal apabila laporan keuangan bebas dari pengertian menyesatkan dan tidak terjadi kesalahan yang menyesatkan. Laporan keuangan dikatakan dapat dipahami apabila menggunakan istilah yang dapat dipahami oleh penggunaannya. Serta laporan keuangan dikatakan dapat dibandingkan apabila laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan entitas lain..

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisa data, interpretasi hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial menunjukkan hasil 0,024 kurang dari 0,05. Sedangkan nilai t hitung $X_1 = 2,372$ dan t tabel sebesar

- 2,042 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,372 > 2,042$). Maka H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial menunjukkan hasil yang signifikan pada nilai lebih kecil dari α ($0,000 < 0,05$), sedangkan nilai t_{hitung} X_2 3,974 dan t_{tabel} sebesar 2,042 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,974 > 2,042$). Maka H_2 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan dalam peningkatan kualitas laporan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
 3. Variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial menunjukkan hasil yang signifikan pada nilai lebih kecil dari α ($0,007 < 0,05$), sedangkan nilai t_{hitung} X_2 3,672 dan t_{tabel} sebesar 2,042 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,672 > 2,042$). Maka H_3 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan dalam peningkatan kualitas laporan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
 4. Pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia dengan statistik menunjukkan hasil yang signifikan pada uji f yaitu α ($0,000 < 0,05$), sedangkan nilai f_{hitung} lebih besar dari f_{tabel} ($108,489 > 2,91$). Dapat disimpulkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka penulis mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya
 - a. Dapat dilakukan dengan metode lain untuk mendapatkan data yang lengkap, misalnya dengan melakukan wawancara secara langsung dengan responden dalam pengisian kuesioner sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya.
 - b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas populasi penelitian, yaitu dengan menambah jumlah responden yang berkerja di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Saran Bagi Responden
 - e. Diharapkan dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan karena menyajikan informasi laporan keuangan secara wajar dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu bukan sebuah prestasi melainkan suatu kewajiban, meningkatkan kompetensi pegawai penatausaha keuangan dalam mengelola dan menyajikan laporan keuangan. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya pegawai penatausaha keuangan yang memiliki keterampilan rendah

- dalam bidang akuntansi, mengevaluasi penerapan standar akuntansi pemerintahan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- f. Pegawai keuangan yang berlatar belakang pendidikan akuntansi akan lebih baik dalam penyusunan laporan keuangan karena telah melalui proses akademis dalam pemahaman terhadap penyusunan laporan keuangan. Adapun staf yang tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi bisa melalui berbagai pelatihan terlebih dahulu untuk menyusun laporan keuangan yang memenuhi aspek kualitatif sesuai dengan apa yang disebutkan dalam PP No 71 Tahun 2010.
3. Bagi Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
 - a. Peneliti ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada pihak terkait. Hendaknya pihak-pihak terkait tersebut mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laporan keuangan.
 - b. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai mampu meningkatkan kualitas laporannya dengan peningkatan pemahaman pegawai terhadap standar akuntansi pemerintahan yang didukung dengan pemanfaatan sistem akuntansi yang baik yang tentunya harus dengan kompetensi sumber daya manusia yang baik, dimana kompetensi sumber daya manusia mencakup tingkat pendidikan, pemahaman, dan pengalaman.

Daftar Pustaka

- Abusyadza. (2017). *Standar akuntansi pemerintah*. Pustaka Setia . Bandung
- Afiyah, N.N. (2017). *Implementasi akuntansi keuangan pemerintah daerah*. Kencana : Jakarta.
- Ahmad Saebni, Beni. (2018). *Metode penelitian*. Pustaka Setia . Bandung.
- Andi Ardi,Kusumah. (2016). *Penyusunan dan analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Bastian, Indra. (2016). *Akuntansi sektor publik suatu pengantar*. Erlangga: Jakarta.
- Bungin, B. (2017). *Metodologi penelitian kuantitatif: komunikasi, ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Diani, Dian Irma. (2018). *Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Parlamen)*. E-Journal Vol 2 No.1 Universitas Negeri Padang, Padang.
- Fajar. (2015).” *Teori akuntansi sektor publik*”
- Fakhrurrazy. (2018). “*Standar akuntansi pemerintah*.”
- Ghozali, Imam. (2017). *Aplikasi analisis multivariat dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Halim, Abdul dan Kusufi, M.S.(2016). “*Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat. Harahap,
- Safitri dan Sofyan. (2018). “ *Analisis kritis atas laporan keuangan*”.PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2016 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Harahap, Safitri dan Sofyan. (2017). “ *Teori akuntansi*”.*Rajawali Pers : Jakarta*. [http://id.wikipedia.org/wiki/SKPD Kabupaten Pati](http://id.wikipedia.org/wiki/SKPD_Kabupaten_Pati). Harum, Elma. (2014).”Laporan keuangan instansi bermasalah”, <http://suamerdeka.com> diakses pada tanggal 25 November 2019
- Hasan, A.Y. (2014). *Pengaruh kompetensi SDM, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern (internal audit) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singing)*. JOM FEKON Vol.1 No. Oktober.
- Hery. (2017). *Analisis laporan keuangan* . Bumi Aksara: Jakarta

- Herlina, Hetti. (2016). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintahan daerah dalam implementasi PP 71 tahun 2010 (Studi empiris :Kabupaten Nias Selatan)*. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Indriantoro, N dan Supomo, B. (20017). *Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Indiriasari, Desi. (2018). *Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah*. Kumpulan Artikel SNA XI: Pontianak.
- Kharis. (2015). *Manajemen sumber daya manusia*. Erlangga: Jakarta.
- Latan, H dan Temalagi, S. (2016). *Analisis multivariate teknik dan aplikasi program IBM SPSS 20.0*. Bandung: Alfabeta.
- Lubis, Arfan Ikhsan. (2015). *Akuntansi keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Luthan, Fred. (2016). *Perilaku organisasi*. Edisi Pertama. Terjemahan Vivin Andika Yuwono dkk. Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi.(2015). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Panduan bagi eksekutif, DPRD dan masyarakat dalam pengambilan keputusan Ekonomi, sosial dan politik*. Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2016). *Akuntansi sektor publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mahaputra, Putu Upabayu Rama dan Wayan Putra.2014.*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah*.Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , ISSN :2302-8556
- Megawati., Ni Luh, G dan Sujana, E . (2015). *Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada Tiga Dinas Kabupaten Buleleng)*. e-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha(Vol.3 No.1) M